



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68/Kpts/HK.110/2/2017  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/07/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1017);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Program Legislasi Pertanian Tahun 2017 sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan dilaksanakan masing-masing unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsinya.
- KEDUA** : Program Legislasi Pertanian Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Unit kerja eselon I berdasarkan kewenangan dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2017, dalam hal:
1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

2. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
3. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 68/Kpts/HK.110/2/2017  
 TENTANG  
 PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN  
 TAHUN 2017

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2017

A. RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRIORITAS  
 TAHUN 2017

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan.	Direktorat Jenderal Perkebunan.
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan.	Direktorat Jenderal Perkebunan.
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan dan Pendanaan Usaha Tani.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.	Badan Ketahanan Pangan.
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Benih).	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas (Benih).	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
10.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi Benih/Bibit Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas (Benih).	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Produksi Tanaman Pangan yang Baik dan Benar.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
12.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Pembinaan dan Perizinan Produk Sistem Pertanian Organik.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.	Direktorat Jenderal Hortikultura.
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Divestasi Saham di Bidang Usaha Hortikultura.	Direktorat Jenderal Hortikultura.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.	Direktorat Jenderal Hortikultura.
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Alokasi Ruang Budidaya Tanaman Perkebunan.	Direktorat Jenderal Perkebunan.
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.	Direktorat Jenderal Perkebunan.
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan Obat Hewan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
19.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peredaran Obat Hewan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
20.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Produk Hewan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
21.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
22.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Kulit ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
23.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
24.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Izin Usaha Peternakan.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
25.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Produk Susu ke dalam dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
26.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
27.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
28.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non-Aparatur.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
29.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
30.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
31.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
32.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
33.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
34.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.	Badan Ketahanan Pangan.
35.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan.	Badan Karantina Pertanian.
36.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan.	Badan Karantina Pertanian.
37.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.	Badan Karantina Pertanian.



NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
38.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di luar Tempat Pemasukan atau Pengeluaran.	Badan Karantina Pertanian.
39.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Transit.	Badan Karantina Pertanian.
40.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.	Badan Karantina Pertanian.
41.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Produk Hewan yang Dikeluarkan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.	Badan Karantina Pertanian.
42.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
43.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara <i>Online</i> .	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
44.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
45.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.	Biro Perencanaan.
46.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis <i>E-planning</i> .	Biro Perencanaan.
47.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bantuan Pemerintah.	Biro Perencanaan.
48.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.	Biro Perencanaan.
49.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.	Biro Perencanaan.
50.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.	Biro Perencanaan.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
51.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.	Biro Perencanaan.
52.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian.	Biro Hukum.
53.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian.	Biro Hukum.
54.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
55.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
56.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
57.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Karantina Hewan.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
58.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Karantina Tumbuhan.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
59.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Bidang Karantina Hewan.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
60.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Bidang Karantina Tumbuhan.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
61.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Penilaian dan Penerapan Standar Pelayanan.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
62.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Bagi Pelaksana Pelayan serta Memberikan Kompensasi Kepada Penerima Layanan Bila Layanan Tidak Sesuai Standar.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
63.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.	Biro Organisasi dan Kepegawaian.
64.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian.	Biro Kerja Sama Luar Negeri.

NO	JUDUL RANCANGAN	KETERANGAN
65.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud.	Biro Keuangan dan Perlengkapan.

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN.

No.	HAL
1.	Mengatasi Keadaan Luar Biasa, Keadaan Konflik, atau Bencana Alam.
2.	Berdasarkan Kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung.
3.	Menjalankan Pemerintahan Berdasarkan Kewenangan Menteri Pertanian.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMRAN SULAIMAN